

Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di desa-desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Siti Umalikhah¹, Doni Fitriyanto²

¹Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

²Graduate of Master Sharia Economics UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Email: donifitriyanto.se@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan desa.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, masyarakat

Abstract

Village Government is the administration of government and the public interests in the system of the Government of the Republic of Indonesia. In essence, as the servant to make the most of their circumstances, or as an element of the government.

The village has a Govt that assigned to the government functions, like public government affairs, empowerment peoples, community welfare and environment order matters. At least Village governance organizational forms must represent a Govt bussineses.

Keyword : Village goverment, Community

Latar Belakang Teoritis

Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Desa diharapkan

dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Pemerintahan desa-desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yang tidak ada pelaksanaan menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengamatan penulis setiap Perangkat Pemerintahan Desa tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai tupoksi misalnya SEKDES (Sekretaris Desa), KAUR (Kepala Urusan)/KASI (Kepala Seksi), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kepala Dusun dan perangkat desa yang lain-lain. Dalam rumusan masalah tersebut, juga dapat berkaitan masalah pelaksanaan BPD yang mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dalam kesepakatan untuk pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadi suatu fenomena yang diamati bahwa BPD tidak dapat difungsikan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan peraturan desa dan pengawasan pembangunan yang ada di pemerintahan desa. Sehingga di dalam Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa

di desa-desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, bergantung pada Perangkat Desa atau Aparat Desa yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pokok masalah atau problematik merupakan suatu hal yang harus ada dalam memuat suatu karya tulis, karena dengan adanya suatu masalah kita dituntut untuk mengadakan analisis dalam mencari dan menumbuhkan pemecahannya. Dalam permasalahan tersebut penulis mengungkap secara singkat tentang pengertian masalah itu sendiri. Menurut Surachmad, (1979:34) mengatakan masalah adalah “Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasi) apabila kita akan berjalan terus. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan bahwa masalah yang benar-benar dapat dimasalahkan dalam penyelidikan perlu memilih unsur-unsur yang menggerakkan kita membahasnya”. Komaruddin (Tanpa Tahun:208). Merumuskan bahwa: “Masalah berasal dari kata Yunani yaitu *problema* yang berarti suatu pernyataan yang dilemparkan untuk dipecahkan atau suatu proposisi yang memerlukan penyelesaian”. Sementara menurut Usman (1976:2) memberikan definisi masalah adalah “Hambatan, rintangan atau kesulitan yang harus diatasi dalam suatu pencapaian tujuan”. Berdasarkan pendapat para sarjana, maka dapat diketahui bahwa masalah merupakan setiap kesulitan yang dialami oleh manusia dalam setiap aktivitas yang memerlukan suatu pemecahan. Dengan demikian masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu : “Bagaimanakah Efektifitas Implementasi SOTK Perangkat Desa terhadap Kriteria Desa di Kecamatan Pakel ?” Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa-Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa-Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah adanya STOK Pemerintah Desa

Kegunaan / Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian adalah :

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan kesempatan baik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ke dunia praktisnya.
- b. Bagi Universitas/ Fakultas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater dan sebagai inventarisasi perpustakaan sebagai bahan bacaan bagi kepentingan.
- c. Bagi Pemerintahan Desa Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintahan Desa, agar Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa yang harus efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis yang mendalam dengan cara mengkaji satu persatu masalah yang ada dalam kasus. Tujuan dari metode kualitatif bukan generalisasi tetapi pemahaman yang secara mendalam terhadap suatu masalah.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan cara mengumpulkan data secara dalam dan lengkap. Dalam penelitian ini kelengkapan dan kedalaman data yang diteliti merupakan suatu yang sangat penting.

Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan model *criterion-based selection* yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Selain itu dalam penentuan informan, dapat menggunakan model snow ball sampling untuk memperluas subyek penelitian. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi

harus didasarkan pada perimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah desa-desa di Kecamatan Pakel.

Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

Observasi

Observasi pada penelitian ini dilakukan di desa-desa se Kecamatan Pakel. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi *open-ended* (terbuka) tentang Pemerintah Desa, permasalahan yang terjadi, tupoksi masing-masing kaur/kasi dan deskripsi lokasi penelitian.

Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang memadai sebagai cross cek dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Seorang peneliti dapat menggunakan beberapa teknik wawancara yang sesuai dengan situasi dan kondisi subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian.

Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Keabsahan data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji

keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Hasil Penelitian

Struktur Organisasi Perangkat Desa menurut Permendagri 87 tahun 2015 tentang Desa

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pakel berada pada Kecamatan Pakel adalah salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung bagian selatan, Luas Wilayah Kecamatan Pakel adalah 36,10 Km² Ha, dengan batas – batasnya sebelah Utara Kecamatan Gondang, Sebelah Timur Kecamatan Boyolangu, Sebelah Selatan Kecamatan Campurdarat, Sebelah Barat Kecamatan Bandung. Penggunaan lahan di Kecamatan Pakel sebagian besar adalah lahan pertanian. Dengan luas persawahan 628.030 Ha, irigasi setemgah tehnis 1498.980 Ha, irigasi sederhana seluas 508.004 Ha, sawah rendengan/tadah hujan seluas 59.215 Ha, serta luas tanah 802197 Ha, kebun 507.114 Ha dan lapangan seluas 28.500 Ha. Kecamatan Pakel terbagi ke dalam 19 desa yaitu Desa Sambitan, Bono, Sukoanyar, Duwet, Tamban, Ngebong, Sodo, Gombang, Pakel, Suwaluh, Kasreman, Bangunmulyo, Pecuk, Sanan, Bangunjaya, Ngrance, Gebang, Gesikan dan Gempolan.

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan dalam Pemerintah Desa

1. Kepala Desa
Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sekretaris Desa
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Kaur Tata Usaha dan Umum

Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan.

4. Kepala Urusan Keuangan
Urusan Keuangan merupakan unsur staf Sekretariat Desa yang membantu tugas Sekretaris Desa dalam urusan administrasi keuangan.
5. Kaur Perencanaan
Urusan Perencanaan merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Sekretaris Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kriteria Desa Permendagri. No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

1. Desa Swadaya
Desa Swadaya merupakan Desa yang masih tradisional dan masih cenderung terisolasi dari kehidupan luar Desa
2. Desa Swakarya
Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya.
3. Desa Swasembada
Desa Swasembada merupakan Desa yang setingkat lebih maju dari Desa Swakarya, dimana adat istiadat masyarakat sudah tidak mengikat. Begitu pula dengan hubungan antar manusia yang sudah bersifat rasional. Mata pencarian penduduk sudah beragam dan bergerak ke sektor tertier. Teknologi baru sudah benar-benar dimanfaatkan di bidang pertanian sehingga produk-tivitasnya tinggi yang diimbangi dengan prasarana desa yang cukup.

Implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Pakel

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Penjelasan ini telah dimuat dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disinggung struktur organisasi desa ini, namun masih bersifat umum. Dan memang secara khusus (teknis) telah ditindaklanjuti/dijabarkan dalam Permendagri 84 thn 2015.

Tujuan Pemberlakuan SOTK Pemerintah Desa

SOTK Pemerintah Desa adalah salah satu landasan dalam pengangkatan atau pengisian jabatan Perangkat Desa, selain aturan khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Juncto Permendagri Nomor 84 tahun 2015.

Dalam logika pemerintahan, bagaimanapun juga, untuk dapat mengangkat seorang pejabat baru, maka struktur atau posisi jabatan harus jelas adanya. Sama halnya dengan Unsur Pemerintah Desa yang didalamnya Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Pakel telah melalui beberapa tahapan, yaitu tahap sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pakel kepada aparat desa, ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Setelah sosialisasi itu dapat dimengerti dan dipahami maka permendagri itu dapat dilaksanakan yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi oleh Camat Pakel.
2. Implementasi SOTK Pemdes sesuai Permendagri 84/2015 di Kecamatan Pakel dapat dikatakan sudah cukup efektif. Desa Bono, Desa Pakel dan Desa Ngebong bisa melaksanakan

kebijakan ini dengan tepat, sehingga SOTK baru yang terbentuk dapat meningkatkan profesionalitas aparat desa dan mengoptimalkan kinerja pemerintah desa. Para perangkat desa di tiga desa tersebut juga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi, dengan menerima dan menjalankannya dengan komitmen perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintah desa.

3. Motivasi perangkat desa dalam bekerja semakin meningkat yang mengakibatkan mekanisme dalam proses pelayanan dan pekerjaan tidak banyak mengalami masalah, sehingga produktivitas kerja pegawai secara keseluruhan pun mengalami peningkatan. Dengan profesionalitas yang meningkat sehingga pelayanan terhadap masyarakatpun lebih optimal.
4. Faktor Sumber daya manusia (SDM) aparat merupakan salah satu faktor penentu implementasi Permendagri 84/2015. Faktor sumber daya ini meskipun sudah cukup memadai namun belum dapat dikatakan optimal hal ini dapat dilihat dari para aparat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus untuk suatu jabatan tertentu. Selain SDM Faktor Anggaran juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penerapan SOTK sesuai permendagri 84/2015. anggaran menjadi sangat menentukan karena untuk memenuhi SDM diperlukan anggaran dalam setiap tahapannya.
5. Selain faktor sumber daya dalam implementasi Permendagri 84/2015 juga didukung dengan adanya komunikasi yang efektif, dimana kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dapat terjalin secara rutin melalui rapat koordinasi, juga sosialisasisosialisasi dan kunjungan Camat ke desa, diantaranya Desa Bono, Desa Pakel dan Desa Ngebong.
6. Disposisi juga menjadi hal yang mendukung implementasi Permendagri di tiga desa tersebut, yaitu Desa Bono, Desa Pakel dan Desa Ngebong dengan berlandaskan komitmen dan kejujuran sehingga dapat menempatkan orang

yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat. Hanya saja faktor pendidikan perangkat desa yang rata-rata hanya SMA menjadikan disposisi tersebut belum optimal.

Saran

1. Saran kebijakan bagi Desa-Desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung sebagai organisasi pemerintahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan modal dasar organisasi yaitu Perangkat Desa, dan optimalisasi dengan memperhatikan fungsi kepemimpinan yang akan mempengaruhi sikap Perangkat Desa dalam mensikapi kondisi kompetitif yang menuntut profesionalisme dari para pelakunya termasuk didalamnya Perangkat Desa.
2. Bagi Pimpinan Desa- Desa di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, Hendaknya lebih mengimplementasikan fungsi-fungsi Kepemimpinan, khususnya faktor perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Hendaknya juga memperhatikan beban kerja, kondisi sosial, dan perilaku bawahannya serta memperhatikan program dan proses kerja seluruh komponen organisasi. Yang terpenting ialah menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif yang didukung oleh kemampuan pimpinan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh baik internal maupun eksternal. Menciptakan pandangan baru yang meyakinkan bawahan atau para pengikutnya, dan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan pandangan itu menjadi sebuah kenyataan.
3. Bagi Perangkat Desa, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja, dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat. Lalu mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dalam pelaksanaan kerja. Memperlihatkan kemampuan dalam pelaksanaan kerja. Serta Berinisiatif, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan tugas.

Daftar Pustaka

- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam. Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Kartono, Kartini. 1993. Pemerintahan dan Kepemimpinan. Rajawali Press. Jakarta
- Kerlinger, 1999. Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi 3, Cetakan 7. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- Moenir, 1992. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian. Jakarta: Gunung Agung
- Moch. Nazir. 2003, Metode Penelitian, Salemba Empat, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1998, Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia. Pustaka LP3ES: Jakarta. 1992.
- _____ 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah. Universitas Tadulako Palu.
- Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, P. Stephen. 1995. Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenhalindo.
- Sedarmayanti. 2007. MSDM Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Cetakan pertama. PT Refika Aditama.
- Soekanto, S., 1992, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali.
- Sondang P. Siagian 2003. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta _____.
- _____ 2008 Manajemen Sumber Daya Manusia Ed. 1, Cet.15-Jakarta Bumi Aksara.
- Suhardono, Edy, 1994. Teori Peran, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.